BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Pembangunan
Edisi : 23 April 2008
Halaman : 14

Perkotaan
Pembangunan Kota Tak Berkelanjutan

Jakarta, Kompas - Pembangunan kota-kota di Indonesia sejauh ini tidak berkelanjutan. Selain tidak memberikan jaminan kualitas hidup warganya, pembangunan kota terjebak pada penekanan tertentu dan mengabaikan sektor lain.

Ciri kota yang umum dijumpai di antaranya kesenjangan ekonomi warga terlalu tinggi, polutif, kriminalitas tinggi, dan diskriminatif.

”Jika jaminan kualitas hidup warga menjadi ciri kota berkelanjutan, maka tak ada satu pun kota di Indonesia masuk kategori itu,” kata pemerhati lingkungan dan perkotaan, pensiunan pengajar Institut Teknologi Bandung, Tjuk Kuswartojo, dalam seminar ”Toward Sustainable Cities in Indonesia”, yang diselenggarakan LEAD Indonesia/ Yayasan Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta, Selasa (22/4).

Berdasarkan data Departemen Pekerjaan Umum, sebagaimana diungkapkan Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Sosial, Budaya, dan Masyarakat Bambang Goeritno, baru 18 persen populasi di Indonesia yang mendapat suplai air bersih dari pipa. Puluhan juta ton sampah tak terolah baik dan peningkatan sampah padat 2-4 persen per tahun dari jumlah 22,5 juta ton sampah padat pada tahun 1995.

Tata ruang lemah

Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Raymond Kemur menyebutkan kelemahan penataan ruang di Indonesia. Pertumbuhan permukiman tak lagi terkendali.

”Ruang antarkota suatu hari akan tersambung, tak ada ruang kosong di antaranya,” katanya.

Tata ruang, lanjutnya, mestinya mengkaji lokasi permukiman baru secara makro dan dampaknya beberapa tahun. ”Selama ini maunya membangun terus,” katanya. Dicontohkan, bagaimana pemerintah kolonial Belanda membangun saluran banjir kanal di Jakarta karena hutan di kawasan Bogor diubah menjadi kebun teh. Saat ini kanalisasi di Jakarta idealnya lebih besar lagi karena kawasan hulu telah berubah menjadi permukiman. Menurut Ketua Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Suahasil Nazara, jumlah kota di Indonesia akan bertambah karena urbanisasi dan perubahan status kawasan.

Pada 2025, sebanyak 65 persen penduduk akan tinggal di kota. Konsekuensinya, dibutuhkan penambahan infrastruktur, seperti permukiman, sektor jasa, dan transportasi. Untuk itu dibutuhkan perencanaan kota dan tata ruang yang matang.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Partisipasi warga

Untuk menjaga kebersamaan dan keseimbangan dari keberagaman di kota, partisipasi warga menjadi mutlak dalam setiap pengambilan keputusan. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan pemerintah kota Jakarta yang menjadi kota panutan.

Koordinator Nasional Target Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) Bappenas/UNDP Ivan A Hadar dalam makalahnya menuliskan, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jakarta tahun 2000-2010 terjadi penyimpangan perencanaan. Jalur hijau dikurangi dan mendukung reklamasi pantai tanpa pertimbangan dampak ekologis dan sosial.

RTRW itu juga tidak membumi karena permukiman kumuh dan pedagang kaki lima tidak tersentuh. Pengumpulan dan pemecahan masalah kota menjadi monopoli perancang kota dan penentu kebijakan.

Di Porto Allegre, Brasil, warga kota, katanya, mampu memberi ide-ide kreatif dan inovatif dalam penyusunan APBD kota. Partisipasi warga dalam pembangunan kota pun meningkat. (GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup